

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN



**LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI
PERJANJIAN KINERJA PUSKEU POLRI
TAHUN 2025**



Jakarta, 14 Februari 2025

LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PERJANJIAN KINERJA PUSKEU POLRI TAHUN 2025

1. Rujukan:

- a. Surat Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Nomor: B/ B/482/XII/REN.3.1./2024/Stamarena tanggal 19 Desember 2024 hal Undangan;
- b. Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Sprin/11/I/KEP./2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang pelaksanaan penyusunan Perjanjian Kinerja Puskeu Polri Tahun 2025.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka, laporan hasil mengikuti Penyusunan Perjanjian Kinerja Polri Tahun 2025 (terlampir).

3. Adapun hasil yang dicapai dalam mengikuti rapat penyusunan perjanjian kinerja polri tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan mencantumkan Indikator Kinerja Utama/Pendukung serta target kinerja yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan;
- b. Puskeu Polri menjadi penanggungjawab dalam pencapaian Indikator Kinerja Pendukung Polri Tahun 2024 pada Sasaran Strategis 6 Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani sebagaimana tabel berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3.4	
2.	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Indeks Harkamtibmas	65	Baharkam
3.	Penegakkan Hukum Secara Berkeadilan	Indeks Gakkum	65	Bareskrim
4.	Profesionalisme SDM	a. Indeks Profesionalisme SDM Polri b. Indeks Kompetensi Diklat SDM Polri	78.75 68	SSDM LEMDIKLAT
5.	Modernisasi Teknologi	a. Persentase Pemenuhan Alkom b. Persentase Pemenuhan Almatsus c. Jumlah Litbang Inovatif d. Persepsi Kemudahan Akses Data	77% 15,37% 2 5	DIV TIK SLOG PUSLITBANG DIV TIK
6.	Pengawasan yang akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani	a. Nilai AKIP b. Level Kapabilitas APIP c. Opini BPK Atas Laporan Keuangan d. Nilai Reformasi Birokrasi e. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) f. Nilai Kinerja Anggaran g. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	80 Level 4 WTP 82 80 94.25% 80%	SRENA ITWASUM PUSKEU SRENA PUSLITBANG SRENA + PUSKEU ITWASUM + BARESKRIM + PROPAM DIV KUM
		h. Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi Polri	80%	

c. Sebagai

- c. Sebagai penanggungjawab Indikator Kinerja Penunjang (IKP) Polri, Puskeu Polri telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2025 guna mendukung pencapaian target pada Renstra Polri tahun 2025-2029. Perjanjian kinerja Satker Puskeu Polri tahun 2025 telah dikirim tepat waktu dan sudah diterima Stamarena Kapolri up. Karo Monev Srena Polri untuk selanjutnya disahkan oleh Kapolri, berikut dokumen Perjanjian Satker Puskeu Polri tahun 2025:

Semula:

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT KEUANGAN POLRI

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan Polri yang modern, efektif, dan akuntabel.	- Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri. - Persentase Laporan Keuangan Satker jajaran Mabes dan wilayah yang tepat saji.	WTP 92%
2	Terselenggaranya penjaminan akurasi dan kualitas hasil verifikasi penyajian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara profesional.	- Jumlah Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan (NPHPW) yang diterbitkan di lingkungan Polri. - Persentase Satker Di Lingkungan Polri Yang Mendapatkan Simpulan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) "Memadai" dan berkategori "Baik".	280 NPHPW 15%
3.	Terwujudnya kesesuaian administrasi pembiayaan yang modern, transparan, dan akuntabel.	- Persentase Penyelesaian Transfer Keluar Transfer Masuk (TKTM).	100%
4.	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Keuangan Satker Mabes dan Wilayah.	- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri. - Persentase jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA \geq 93,75.	95,25 80%
5.	Tata kelola Puskeu Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel.	- Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu Polri. - Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Puskeu Polri. - Presentase SDM Fungsi Keuangan yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Keuangan. - Indeks Profesionalitas SDM Puskeu Polri.	80,1 (A) 76,5 60%
		- Jumlah Pelaksanaan Anev Terhadap Dokumen Pembinaan Fungsi di Lingkungan Puskeu Polri.	71 4 Dokumen

Program

1. Program Profesionalisme SDM Polri
2. Program Modernisasi Alamsus dan Sarana Prasarana Polri
3. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
4. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp. 3,814,119,000,-
Rp. 4,102,260,340,000,-
Rp. 1,110,334,989,000,-
Rp. 20,918,219,770,000,-

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

Jakarta, Januari 2025
KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

- d. Perjanjian Kinerja Satker Puskeu Polri T.A. 2025 mengalami perubahan pada narasi indikator kinerja sebagai berikut:

Menjadi

Menjadi:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan Polri yang modern, efektif, dan akuntabel.	- Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri. - Persentase Laporan Keuangan Satker jajaran Mabes dan wilayah yang tepat saji.	WTP 92%
2	Terselenggaranya penjaminan akurasi dan kualitas hasil verifikasi penyajian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara profesional.	- Jumlah Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan (NPHPW) yang diterbitkan di lingkungan Polri. - Persentase Efektivitas Penerapan PIPK pada Satker di Lingkungan Polri yang memperoleh penilaian Efektif atau Efektif Dengan Pengecualian.	280 NPHPW 15%
3.	Terwujudnya kesesuaian administrasi pembiayaan yang modern, transparan, dan akuntabel.	- Persentase Penyelesaian Transfer Keluar Transfer Masuk (TKTM).	100%
4.	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Keuangan Satker Mabes dan Wilayah.	- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri. - Persentase jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA \geq 93,75.	95,25 80%
5.	Tata kelola Puskeu Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel.	- Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu Polri. - Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Puskeu Polri. - Presentase SDM Fungsi Keuangan yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Keuangan.	80,1 (A) 76,5 60%

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 Februari 2025

KASUBBAGREN



ENDAH PUSPITA RINI, A.Md.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74110870